

Lokalitas Minangkabau dalam Cerpen Indonesia Modern sebagai Pembelajaran Teks Sastra di Sekolah

Ferina Meliasanti

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: ferina.meliasanti@fkp.unsika.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan representasi warna lokal Minangkabau pada cerpen Indonesia modern, yaitu "Jodoh" karya A.A Navis, "Si Padang" karya Harris Effendi Thahar, "Ketika Jenderal Pulang" karya Khairul Jasmi, dan "Tali Rabab" karya Raudal Tanjung Banua. Melalui pendekatan Sosiologi Sastra, maka karya sastra tersebut dilihat sebagai dokumen sosial budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Teknik pengolahan data-datanya melalui analisis struktur aspek semantik dan aspek sintaksis, maka dihasilkan penelitian, bahwa lokalitas Minangkabau yang terdapat dalam empat cerpen tersebut memiliki tingkat persamaan lokalitas dalam ruang lingkup Minangkabau. Lokalitas yang terdapat pada satu cerpen juga mewakili lokalitas yang terdapat pada cerpen lainnya, kecuali cerpen "Ketika Jenderal Pulang" karya Khairul Jasmi. Lokalitas Minangkabau tersebut meliputi falsafah alam Minangkabau yang meletakkan manusia sebagai salah satu unsur statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti tanah, rumah, suku, dan nagari, dasar semua ketentuan adat Minangkabau yang terhimpun dalam petatah-petitih adalah rasional atau masuk akal. Cerpen-cerpen tersebut mengacu pada representasi lokalitas Minangkabau berupa pola kemasyarakatan, sistem kekerabatan, perkawinan, adat dan hukum, penghulu, karakteristik orang Minangkabau, kesusastraan, tradisi, dan sejarah Sumatra Barat dalam Politik Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai materi pengayaan materi pembelajaran teks cerpen kelas XI jenjang SMA.

Kata kunci: Warna Lokal, Minangkabau, Cerpen, Sosiologi Sastra, Pembelajaran Sastra

Abstract

The purpose of this research is to describe the representation of Minangkabau local colors in modern Indonesian short stories: "Jodoh" written by A.A Navis, "Si Padang" written by Harris Effendi Thahar, "Ketika Jenderal Pulang" written by Khairul Jasmi, and "Tali Rabab" written by Raudal Tanjung Banua. Through the Sociology of Literature approach, the literary work is seen as a socio-cultural document. The research method used is analytical descriptive, and data collection techniques are carried out by literature study. The technique of processing the data through structural analysis of the semantic and syntactic aspects, resulted in research that the Minangkabau locality contained in the four short stories has the same level of locality within the Minangkabau scope. The locality contained in one short story also represents the locality found in other short stories, except for the short story "Ketika Jenderal Pulang" written by Khairul Jasmi. The Minangkabau locality includes the Minangkabau natural philosophy which places humans as one of the elements with the same status as other elements, such as land, houses, tribes and nagari. These short stories refer to representations of Minangkabau locality in the form of social patterns, kinship systems, marriage, customs and laws, princes, characteristics of the Minangkabau people, literature, traditions and history of West Sumatra in Indonesian politics. The results of this research can be used as enrichment material for learning short story texts for class XI at the high school level.

Keywords: *locality, Minangkabau, short stories, sociology of literature, literature learning*

PENDAHULUAN

Sastra Indonesia dilahirkan dari rahim sastrawan yang tidak dapat melepaskan dirinya dari kultur etnik yang membesarkan dan membentuknya. Mengingat sastrawan Indonesia berasal dari pluralitas dan keanekaragaman etnik, maka sastra Indonesia mencerminkan juga keanekaragaman itu. Bahkan, boleh

dikatakan, pluralitas etnik itu merupakan ruh yang mendiami sastra Indonesia. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu hakikat yang melatarbelakangi hakikat kelahiran sastra Indonesia modern (Mahayana, 2005: 61).

Menurut (Teeuw, 1989: 152), penelitian terhadap aspek-aspek kemasyarakatan dipicu oleh stagnasi analisis strukturalisme, analisis yang semata-mata didasarkan atas hakikat otonomi karya. Sebaliknya, karya sastra dapat dipahami secara lengkap hanya dengan mengembalikannya pada latar belakang sosial yang menghasilkannya, melalui analisis dalam kerangka penulis, pembaca, dan kenyataan. Grebstein (Mahayana, 2005: 338), mengungkapkan bahwa pemahaman atas karya sastra hanya mungkin dapat dilakukan secara lebih lengkap, apabila karya sastra itu tidak dipisahkan dari lingkungan, kebudayaan atau peradaban yang menghasilkannya. Dikatakan juga, bahwa karya sastra adalah hasil pengaruh yang rumit dari faktor-faktor sosial dan kultural. Pernyataan ini mengisyaratkan perlunya menghubungkan faktor sosio-budaya dalam usaha memahami karya sastra selengkapnyanya.

Seperti halnya sastra dengan pengaruh warna lokal atau sebuah lokalitas dalam karya sastra, menjadi menarik untuk ditengok kembali. Sastra warna lokal ditandai oleh pemanfaatan *setting*, pengarang berfungsi sebagai wisatawan, dan melukiskan permukaan untuk melihat lebih jauh struktur di dalamnya (Ratna, 2015: 389-390). Sebuah lokalitas dalam karya sastra tersebut dikatakan menarik, setidaknya sudah sejak dua dekade lalu isu ini tenggelam di tengah semrawut perbincangan sastra Indonesia. Kita ingat pada sekitar akhir 1980-an sempat merebak isu tentang warna lokal (*local colour*). Dalam operasionalisasinya, warna lokal diperlakukan sebagai bagian dari struktur karya sastra, khususnya sebagai salah satu aspek *setting*, atmosfer, dan penggunaan bahasa. Sebagai bagian dari latar fisik dan ruang, warna lokal dikaitkan dengan geografi, semisal Sumatra Barat, Riau, dan Jawa. Atmosfer dan ciri-ciri kultural setempat semisal adat-istiadat, ritual-ritual, sampai dengan kecenderungan interferensi leksikal-idiomatik bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan di dalamnya (Budiman, 2005).

Sastra dengan warna lokal sudah dimulai sejak masa Balai Pustaka, dengan menampilkan kekhasan daerah dan adat istiadat Minangkabau dengan ciri-ciri matriakat dan kawin paksa. Bertendensi menentang adat dengan meledek atau mengejek dan kadang-kadang sarkatis. Semenjak *Siti Nurbaya* karya Marah Rusli, yang merupakan roman adat yang lahir pada masa angkatan 20-an, diterbitkan pada tahun 1922, nampaknya konfrontasi orang Minangkabau dengan sistem adatnya masih belum selesai ditulis. Seolah-olah masalah adat itu tidak kunjung usai. Setelah melewati dua periode (Pujangga Baru dan Periode '45), sastra warna lokal lahir kembali pada periode 1960-an, pada waktu bangsa Indonesia mulai mempertanyakan kembali jati dirinya (Ratna, 2015: 291).

Minangkabau sebagai suatu budaya dan adat yang kompleks, menjadi selalu menarik untuk diperbincangkan. Sebagaimana kita tahu, sastra Indonesia pada awalnya ditulis dalam bahasa Melayu yang kemudian—lewat Sumpah Pemuda—diangkat menjadi bahasa Indonesia; sebuah bahasa etnis yang penyebarannya di wilayah Nusantara telah mempunyai sejarah yang panjang (Collins, 2005). Sastrawan Minangkabau mengusung persoalan sosial budaya sebagai tema karya mereka dengan memperlihatkan corak kebudayaan etnisnya (Jasril, 2017; Piliang, 2017). Saat membuat karya sastra, pengarang cenderung menuangkan ide-idenya berdasarkan lingkungan tempat ia dibesarkan. Sosok pengarang merupakan bagian dari suatu masyarakat tertentu sehingga latar belakang seorang pengarang dapat terlihat dalam hasil karyanya (Inda, 2015). Meski terjadi perubahan dalam konstelasi kesusastraan Indonesia selepas perang dan sastrawan asal Sumatera tidak lagi mendominasi peta perkembangannya, tidaklah berarti sastrawan asal Sumatera kemudian tenggelam. Secara kultural, Sumatera memang sumber mata air yang tidak pernah habis. Ia niscaya juga bakal tiada henti mewarnai lanskap kesusastraan Indonesia. Sebutlah seperti Merari Siregar, Marah Rusli, Hamka, dll, sampai kemudian muncul generasi berikutnya yang malah lebih dahsyat lagi, seperti A.A Navis, Taufik Ikram Jamil, Gus tf Sakai, Yusrizal KW, dan sampai ke sastrawan angkatan terkini, seperti Marhalim Zaini, Abel Tasman, Azhari, Olyrinson, dan Raudal Tanjung Bua, merupakan karya-karya yang kental dengan lokalitasnya.

Mahayana (2006: 306) menyatakan bahwa “dominasi sastrawan Minangkabau yang didukung dengan mesin politik kolonial di bidang pendidikan telah membawa peta perjalanan sastra Indonesia berada di dalam lingkaran Minangkabau”. Pemetaan khusus secara tertulis tentang para penulis cerpen Indonesia modern dari

Sumatera Barat dengan tema umum yang mendominasi, yaitu lokalitas Minangkabau, memang belum dapat penulis rinci dengan lengkap dan tepat (berdasarkan pertimbangan sejarah cerpen Indonesia yang telah dijelaskan sebelumnya). Namun, dimulai sejak kemunculan Hamka pada tahun 1941 dengan kumpulan cerpen *Di dalam Lembah Kehidupan*, kemudian disusul oleh Sa'adah Alim yang menerbitkan *Taman Penghibur Hati* (1941), dan selanjutnya Idrus dengan *Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma* (1948), memperkuat arah perjalanan para cerpenis asal Sumatera Barat. Ketiga kumpulan cerpen tersebut lebih umum bertemakan kesedihan, cerita pergaulan, dan semangat revolusi terhadap nasionalisme.

Muncullah kemudian cerpenis angkatan setelah Hamka, Sa'adah Alim, dan Idrus, yakni A.A Navis. Navis dengan salah satu cerpennya yang berjudul *Jodoh* (1999a) merupakan cerpen yang memiliki lokalitas yang tidak akan ditemui di tempat lain. Hal itu dikarenakan bahwa lokalitas tidak hanya bentuk fisik yang membantu cerita bermain seperti alam atas lokasinya, melainkan kehidupan sosial dan alam pikiran pelaku cerita yang hanya mungkin dapat ada secara setempat. Dalam hal ini Minangkabau, jadi pengertian warna lokal itu ialah kehidupan dan alam pikiran etnik yang khas terlihat (Navis, 1999: 177). Setelah kemunculan Navis, maka tumbuhlah angkatan-angkatan baru, antara lain Darman Moenir, Wisran Hadi, Wildan Yatim, Ismet Fanany, Hamid Jabbar, Harris Effendi Thahar, Adek Alwi, Ode Barta Ananda, Gus tf Sakai, Abrar Yusra, Khairul Jasmi, Abel Tasman, Yusrizal KW, Yetti A.KA, Afrizal Malna, Helen Yahya, Motinggo Busye, Raudal Tanjung Bua, Iyut Fitra, dan lain sebagainya. Cerpen-cerpen yang ditulis oleh para pengarang itu banyak pula yang bernafaskan lokalitas Minangkabau.

Minangkabau merupakan negeri adat, tapi menurut alam pikiran Minangkabau, adat memiliki arti sama dengan seluruh aktivitas manusia, yaitu kebudayaan (Navis, 1984). Maka itu, lokalitas Minangkabau inilah merupakan salah satu dokumen sosial budaya yang patut dieksplorasi untuk mengetahui lebih dalam lagi melalui karya sastra. Minangkabau hanya memiliki sistem kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit diketahui sejarah dan batas wilayah, raja-raja, serta epos cerita pahlawan dan orang-orang besarnya sebagai alat pendukung kehadiran suatu negara dalam sejarahnya. Nama Minangkabau sendiri ditemukan pada perpustakaan Jawa pada abad ke-14. Sepanjang sejarahnya sejak abad ke-7, Minangkabau dikuasai oleh penganut Budha dan selanjutnya oleh Hindu. Sejak abad ke-16 mulailah Islam menjadi anutan mereka. Semua agama tersebut tidak banyak mengubah struktur dan sistem kebudayaan (Navis, 1999b). Masyarakat Minangkabau terdiri atas suku-suku. Suku utama adalah Bodi, Caniago, Koto, dan Piliang. Suku-suku ini terpecah-pecah lagi menjadi suku-suku baru, seperti Melayu, Jambak, Sikumbang, Tanjung, Patapang, dan lain-lain (Suwando, Bambang, 1978b, 1978a).

Sebagai masyarakat adat, Minangkabau tidak mempunyai ikon kenegaraan, melainkan konsep "nagari" yang menjadi tempat berhimpun untuk hidup bersama dengan hak dan derajat yang sama dalam kodrat yang berbeda. Agama Islam bukanlah produk kebudayaan Minangkabau. Namun, digunakan secara mendalam seperti halnya adat. Dengan kata lain, Minangkabau adalah pemakai agama tunggal. Orang Minangkabau mengaku, bahwa pandangan hidup mereka berasal dari filsafat alam dan takluk kepada hukumnya. Peribahasa menjadi pedoman hidup untuk selalu merujuk pada sistem, struktur, dan fungsi setiap substansi alam. Mereka hidup berkumpul-kumpul. Dalam kumpulan sosial disebut kaum (*clan*). Dalam kumpulan permukiman disebut nagari (*state*). Masing-masing kaum di nagari itu berstatus otonom. Hubungan antara kumpulan tersebut bersifat perserikatan (*federasi*), yang disatukan oleh filsafat dan agama Islam. Masyarakat Minangkabau termasuk masyarakat yang dualism. Di satu sisi, Minangkabau sangat menjunjung tinggi agama Islam yang terungkap dalam falsafah, "Adat basandi syarak; Syarak basandi kitabullah", "Adat bersendikan syarak atau agama; Syarak atau agama bersendikan kitab Allah (Alquran)". Sementara di sisi lain, masyarakat Minangkabau juga menjunjung adat yang dalam praktik pelaksanaannya banyak bertentangan dengan agama Islam, misalnya dapat dilihat dari konsep perkawinan dan pembagian harta warisan (Jasril, 2017; Piliang, 2017).

Cerpen-cerpen Indonesia modern yang memiliki gagasan lokalitas Minangkabau dapat dianalisis menggunakan Sosiologi Sastra karena mempelajari keseluruhan jaringan hubungan antarmanusia dalam masyarakat, sifatnya umum, rasional, dan empiris (dalam Ratna, 2015: 1). Vladimir Jdanov pada tahun 1965 (dalam Ratna, 2015) mengemukakan bahwa "sastra harus dipandang dalam hubungan yang tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat, latar belakang unsur sejarah dan sosial yang mempengaruhi pengarang...".

Dalam pandangan Wolf (Faruk, 2005: 3) sosiologi sastra merupakan disiplin yang tanpa bentuk, tidak terdefiniskan dengan baik, terdiri dari sejumlah studi-studi empiris dan berbagai percobaan pada teori yang agak lebih general, yang masing-masingnya hanya mempunyai kesamaan dalam hal, bahwa semuanya berurusan dengan hubungan sastra dengan masyarakat. Tujuan sosiologi sastra (Jabrohim, 2001: 169) adalah untuk mendapatkan deskripsi lengkap, utuh, dan menyeluruh tentang hubungan timbal balik antara sastrawan, karya sastra, dan masyarakat guna memberikan peningkatan pemahaman dan penghargaan kita terhadap sastra itu sendiri.

Alan Swingewood (Junus, 1986: 1-5) membagi teori-teori sastra menjadi beberapa bagian, yaitu sosiologi dan sastra, teori-teori sosial tentang sastra, sastra dan strukturalisme, dan persoalan metode. Pendekatan yang mengungkap refleksi dokumen sosial budaya, mengimplikasikan bahwa karya sastra menyimpan hal-hal penting bagi kehidupan sosial budaya melalui unsur-unsur sosial budaya yang terkandung di dalamnya dan hanya bersifat parsial. Langkah yang ditempuh melalui pendekatan ini memiliki strategi, yaitu sesuatu unsur dalam karya sastra diambil terlepas dari hubungannya dengan unsur lain. Unsur ini secara langsung dihubungkan dengan suatu unsur sosial budaya karena karya ini hanya memindahkan unsur itu ke dalam dirinya. Menurut Taine (Junus, 1986: 19), bahwa karya sastra memang dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat, yaitu ras, waktu, dan lingkungan. Dalam hal ini, sastra akan dipengaruhi oleh kondisi sejarah dan kelas masyarakat, yang akan tampak pada gaya maupun bentuk sastra.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis berupa mendeskripsikan secara keseluruhan, memanfaatkan cara-cara penafsiran untuk menganalisis keseluruhan data yang telah diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Teknik pengolahan data-datanya melalui analisis struktur aspek semantik dan aspek sintaksis, dengan teori sastra yang digunakan adalah pendekatan sosiologi sastra, yaitu karya sastra dilihat sebagai dokumen sosial budaya. Sumber data cerpen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi (1) cerpen “Jodoh” karya A.A Navis dalam *Antologi Lengkap Cerpen* A.A Navis (1999a), (2) cerpen “Si Padang” karya Harris Effendi Thahar dalam buku kumpulan cerpen *Si Padang* (2003), (3) cerpen “Ketika Jenderal Pulang” dalam buku Kumpulan Cerita dari Sumatera Barat, *Kalau Julies Sedang Rindu* (2004), dan (4) cerpen “Tali Rabab” karya Raudal Tanjung Banua dalam buku kumpulan cerpen *Parang Tak Berulu* (2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Representasi Lokalitas Minangkabau

1.1 Falsafah Alam Minangkabau

Falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti tanah, rumah, suku, dan nagari. Persamaan status itu mereka lihat dari keperluan budi daya manusia itu sendiri. Setiap manusia memerlukan tanah, rumah, suku, dan nagari sebagaimana mereka memerlukan manusia atau orang lain bagi kepentingan lahir dan batinnya. Menurut alam pikiran mereka, manusia atau orang merupakan sesuatu yang sempurna, seperti sempurnanya. Yang tidak mempunyai salah satu atau semua keperluan budi daya akan dipandang sebagai *orang kurang*. Oleh karena itu, setiap manusia atau orang dipandang dalam status yang sama. *Tagak samo tinggi, duduak samo rendah* (tegak sama tinggi, duduk sama rendah), kata petuah mereka (Navis, 1999a: 59).

Secara sosio-psikologis, kemampuan manusia dalam berbuat sesuatu tidaklah sama. Sesuai dengan contoh yang diberikan alam ada bermacam-macam pohon dengan bermacam-macam budah yang berbeda bentuk dan rasanya. Oleh karena itu, pembedaan pandangan terhadap manusia ditentukan prestasinya dalam berusaha menjadi mulia, ternama, pintar, atau kaya. Mamangan memberi petunjuk untuk prestasi yang terbaik bagi masing-masing usaha yang mungkin dapat dicapai manusia, yaitu *nak mulia batabua urai, nak tuah tagak di nan manang, nak cadiak sungguah baguru, nak kayo kuaik mancari* (hendak mulia suka memberi, hendak ternama dirikan kemenangan, hendak pandai rajin berguru, hendak kaya kuat berusaha). Maksudnya, setiap orang harus berusaha sekuat-

kuatnya bila ingin mendapat tempat yang terkemuka (Navis, 1999a: 61).

Menurut strukturnya, seseorang adalah individu dan semua individu adalah anggota masyarakat etnis dan lingkungannya. Sedangkan menurut sistem masyarakatnya yang komunal, setiap individu adalah milik masyarakatnya dan masyarakat itu sendiri adalah milik bersama dari setiap individu. Oleh karena saling memiliki, kedua belah pihak tidak dapat saling menguasai. Uraianannya adalah bahwa setiap individu dapat membangun dirinya (M.S, 2006). Sebagai anggota masyarakat, ia akan dibela dan didorong kerabat dan lingkungannya agar menjadi orang. Oleh karena setiap individu menjadi besar dan tinggi berkat masyarakat sendiri, setiap individu akan merasa dirinya berutang budi.

1.2 Landasan Berpikir Orang Minangkabau

Pada dasarnya semua ketentuan adat Minang yang terhimpun dalam petatah-petitih adalah rasional atau masuk akal. Oleh karena itu, hal-hal yang irrasional kurang berkembang di Minangkabau. Orang Minang lebih senang berjualan, bersorak-sorak di kaki lima dan perbuatan nasib nyata yang lain misalnya berkelana atau merantau untuk mengubah nasib diri. Landasan berpikir orang Minangkabau tercakup dalam pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut, *rumah basandi batu* (rumah bersendi batu), *adat basandi alue patuik* (adat bersendi jalan yang benar dan pantas), *memakai anggo jo tanggo* (memakai aturan yang wajib diturut), dan *sarato raso jo pareso* (serta budi pekerti dan kecermatan) (Latief, Chaidir N., 2004).

Pada dasarnya jiwa orang Minang pada umumnya anti penindasan, anti kemiskinan, dan anti kemapanan. Mereka selalu melakukan perlawanan terhadap keadaan yang sedemikian. Proses perubahan yang dilakukan dengan cara ini oleh Hegel disebut dengan “dialektika”, dimana suatu keadaan yang ada (thesa) menimbulkan antithesa sehingga menimbulkan suatu situasi konflik. Setiap konflik akan mencari jalan penyelesaiannya sendiri dalam bentuk sinthesa. Kebanyakan orang Minang berwatak demikian. Salah satu landasan orang Minang adalah dialektika ini. Dengan demikian, terdapat empat landasan pokok berpikir orang Minang menurut adat (Hakimy, 1994) antara lain (1) *Logika atau alue patuik*: Alue artinya alur atau jalur jalan yang benar. Patuik artinya pantas dan sesuai atau masuk akal. Jadi, alue patuik artinya orang Minang harus dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tujuan utama dari prinsip “alue patuik” ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat dan sekaligus menghindari sengketa antara anggota masyarakat. Dalam hal ini sangat ditegaskan bahwa adat Minang menuntun orang memakai logika, (2) *Tertib hukum atau anggo tanggo*: Anggo artinya anggaran seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Anggo tanggo artinya peraturan atau segala yang ditentukan dan harus dituruti. Jadi, anggo tanggo artinya mengerjakan sesuatu harus sesuai dengan aturan pokok atau aturan rumah tangga adat, (3) *Ijtihad (penelitian) atau raso pareso*: Raso artinya rasa, pareso artinya periksa atau teliti. Raso jo pareso artinya membiasakan mempertajam rasa kemanusiaan atau hati nurani yang luhur dalam kehidupan sehari-hari, dan (4) *Dialektika atau musyawarah mufakat (sinthesa)*: Salah satu tujuan adat Minangkabau adalah membentuk individu yang berbudi luhur, manusia yang berbudaya, dan manusia yang beradab. Untuk mencapai masyarakat yang demikian, diperlukan manusia-manusia dengan sifat-sifat dan watak tertentu. Hal tersebut tampak pada cerpen “Jodoh” karya A.A Navis berikut ini:

Dan itu tidak mudah ditemuinya dalam masyarakat yang berbakat pendek. Halangan lainnya, karena Badri berdarah campuran yang dianggap kurang bermutu menurut pandangan adat Minangkabau yang lebih menyukai perkawinan awak sama awak. Halangan lain ialah kalkulasi biaya hidup yang takkan klop lagi bila ia menikah. (Navis, 1999a: 2).

1.3 Sistem Kekerabatan

Menurut beberapa ahli antropologi pada abad ke-19, antara lain J. Lublock dan G.A. Wilken, manusia pada mulanya hidup berkelompok, berhubungan, dan melahirkan keturunan tanpa ikatan. Kelompok keluarga batih (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak seperti sekarang, belumlah ada. Lambat laun manusia sadar akan hubungan antara ibu dan anak-anaknya sebagai satu

kelompok keluarga. Oleh karena itu, anak-anak hanya mengenal ibunya dan tidak tahu ayahnya. Dalam kelompok keluarga batih, ibu dan anak-anaknya seperti inilah, si ibu menjadi kepala keluarga. Dalam kelompok ini mulai berlaku aturan, bahwa persenggamaan (persetubuhan) antara ibu dengan anak lelakinya dihindari dan dipantangkan (tabu). Inilah asal mula perkawinan di luar batas kelompok sendiri yang sekarang disebut dengan adat eksogami. Artinya, perkawinan hanya boleh dilakukan dengan pihak luar, sedangkan perkawinan dalam kelompok serumpun tidak diperkenankan sepanjang adat.

Kelompok keluarga ini tadi semakin lama semakin bertambah banyak anggotanya. Dikarenakan garis keturunan selalu diperhitungkan menurut garis ibu, dengan demikian terbentuk masyarakat yang disebut masyarakat matriarkat. Istilah matriarkat yang berarti “ibu yang berkuasa” sudah ditinggalkan. Para ahli sudah tahu bahwa sistem ibu yang berkuasa itu tidak ada. Yang ada ialah kelompok keluarga yang menganut prinsip silsilah keturunan yang diperhitungkan melalui garis ibu, dalam bahasa asing disebut garis matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat 3 unsur yang paling dominan, yaitu garis keturunan “menurut garis ibu”, perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal, dan Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan, dan kesejahteraan keluarga yang tampak dalam cerpen “Jodoh” karya A.A. Navis dan garis keturunan matrilineal pun terdapat pada cerpen “Tali Rabab” karya Raudal Tanjung Banua berikut:

Riwayat keturunanaku panjang berjela-jela, namun hidup di hati setiap orang. Tentu saja, karena Mandeh Rubiah diyakini sebagai tak lain Bundo Kanduang, perempuan bijak bestari yang pernah bertakhta di alam Minangkabau. Bersama putra mahkotanya Dang Tuanku dan seorang putri bernama Puti Bungsu beserta beberapa pengikutnya, salah satunya Cindur Mato, Bundo Kanduang meninggalkan secara diam-diam pusat kerajaannya di Pagaruyung, memilih menetap di ujung Minangkabau buat selamanya. Di sini, Andam, di kampung yang kucintai ini! Orang menduga, Bundo Kanduang telah mengirap (mi'raj?) ke langit ke tujuh karena pergi tak ada jejak, hilang tak ada kabar beritanya. (Banua, 2005: 113-114).

Sistem matrilineal adalah sistem dari pola budaya egaliti. Menurut alam pikiran Minangkabau egaliti itu disebut *samo*, yang artinya persamaan, kesamaan, kebersamaan antara sesama kita manusia. Dengan demikian, sistem matrilineal merupakan sistem untuk memantapkan kedudukan perempuan agar sederajat dengan laki-laki secara hukum, sosial, dan kebudayaan. Oleh karena itu, perempuan diberi kekuatan pengimbang, yakni dengan pemilikan atas harta dan anak, sedangkan laki-laki memperoleh hak kepemimpinan. Dengan demikian perempuan tidak menggantungkan hidupnya pada laki-laki yang menjadi suaminya. Namun, mereka tidak dapat melampaui kodratnya, misalnya ikut menjadi pemimpin formal dalam kaum atau nagari dengan atribut sebagai datuk. Sistem matrilineal dikukuhkan oleh nilai-nilai sosial budaya yang lazim disebut adat sehingga ego laki-laki yang biologis kuat tidak berpeluang mengubah status atau sistem.

Silsilah keturunan menurut garis ibu yang lazim disebut garis keturunan matrilineal termasuk ke dalam tingkat adat Minangkabau, yaitu *adat nan sabana adat*, aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku orang Minangkabau yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh tempat, waktu, dan keadaan.

a) Perkawinan

Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan. Perkawinan demikian lazim disebut sebagai *pulang ke anak mamak* atau *pulang ke bako*. *Pulang ke anak mamak* berarti mengawini anak mamak sedangkan *pulang ke bako* ialah mengawinikemenakan ayah. Tingkat perkawinan ideal berikutnya ialah perkawinan *ambil-mengambil*. Artinya kakak beradik laki-laki

dengan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan orang sekorong, sekampung, senagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar wilayah Minangkabau kurang disukai, meskipun tidak dilarang (Suwando, Bambang, 1978a).

Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara “*awak sama awak*”. Hal tersebut bukanlah menggambarkan bahwa mereka menganut sikap yang eksklusif. Pola perkawinan “*awak sama awak*” itu berlatar belakang komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sistem yang dianut mereka itu barulah akan utuh apabila tidak dicampuri orang luar. Dalam pola perkawinan eksogami yang menjadikan ikatan suami istri begitu semu, hal itu diperlukan sebagai modus agar lembaga perkawinan tidak menjadi rapuh. Modus itu adalah perkawinan “*awak sama awak*”. Semakin dekat hubungan awaknya, semakin kukuhlah hubungan perkawinan itu. Perkawinan dengan orang luar, terutama mengawini perempuan luar dipandang sebagai perkawinan yang akan bisa merusakkan struktur adat mereka. Hal pertama adalah karena anak yang lahir dari perkawinan itu bukanlah suku bangsa Minangkabau. Disamping itu, kehidupan istri akan menjadi beban bagi suaminya, padahal setiap laki-laki bertugas utama bagi kepentingan sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarnya. Oleh karena itu, kehadiran seorang istri yang merupakan orang luar dipandang sebagai beban bagi seluruh keluarga. Bahkan bisa pula laki-laki itu akan menjadi “*anak hilang*” dari kaum kerabatnya karena kepintaran perempuan itu merayu suaminya. Sebaliknya, perkawinan perempuan mereka dengan laki-laki luar tidaklah akan mengubah struktur adat karena anak yang lahir tetap menjadi suku bangsa Minangkabau.

Perkawinan dengan pihak luar pesukuan yang lazim dikenal dengan tata perkawinan eksogami, dan suami yang bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat istri (*matrilocal*) termasuk ke dalam tingkat adat Minangkabau, yaitu *adat nan sabana adat*, aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku orang Minangkabau yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh tempat, waktu, dan keadaan. Lokalitas Minangkabau tentang perkawinan ini disinggung dalam cerpen “*Tali Rabab*”, “*Jodoh*”, dan seperti pada kutipan cerpen “*Si Padang*”:

Seminggu menjelang Idul Fitri yang lalu mamakku itu pulang ke rumah gadang di kampung. Ia memang sudah lama tak pulang. Ia pulang membawa sambil memperkenalkan istri mudanya dan si bungsu Lidia. Istri tuanya sudah lama meninggal dan orang Padang juga. Tapi, istri mudanya ini kabarnya orang Betawi asli. Cantik dan masih muda. (Thahar, 2003: 3).

b) Penghulu

Dalam cerpen “*Si Padang*” karya Harria Efendi Thahar, golongan dan kelompok dalam masyarakat Minangkabau mempunyai pimpinan yang berada di tangan mamak. Pengertian mamak secara harfiah ialah saudara laki-laki ibu. Secara sosiologis semua laki-laki dari generasi yang lebih tua adalah mamak. Hal ini sebagai pernyataan bahwa semua orang berkerabat, sesuai dengan ajaran falsafah mereka. Yang tidak termasuk mamak adalah laki-laki kerabat dengan ayah, yang dipanggil dengan *bapak* atau *pak*. Mamak merupakan pemimpin. Oleh karena itu, pengertian mamak pada setiap laki-laki yang lebih tua juga berarti pernyataan bahwa yang muda memandang yang lebih tua menjadi pimpinannya, sebagaimana yang diungkapkan mamak: *kemankan barajo ka mamak, mamak barajo ke penghulu, penghulu barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo* (kemenakan baraja kepada mamak, mamak baraja kepada penghulu, penghulu baraja ke kebenaran, kebenaran berdiri sendirinya). Pimpinan golongan dan kelompok geneologis yang berdasarkan sistem matrilineal itu ialah mamak menurut tingkatannya masing-masing. Pemimpin sebuah rumah tangga disebut tungganai. Pemimpin kaum disebut mamak kaum. Pemimpin suku ialah penghulu.

Mamangan mengatakan bahwa orang Minangkabau sebagai *ketek banamo, gadang bagala* (kecil bernama, besar bergelar). Artinya selagi kecil mereka diberi nama dan setelah besar yang umumnya setelah menikah, mereka memperoleh gelar dan hal itu hanya berlaku khusus bagi laki-

laki. Setiap lelaki yang menikah akan memperoleh gelar. Hal ini berarti nama baginya menjadi tiada. Sehari-hari gelar itulah yang dipanggil kepadanya. Memanggil nama kecil dapat diartikan sebagai penghinaan.

Lebih-lebih kalau yang memanggil kerabat pihak istri. Gelar itu merupakan warisan kerabat. Apabila setiap warga masyarakat diberi gelar setelah ia menjadi gadang, maka penghulu menjadi orang gadang basa batuah (mahabesar bertuah) pun diberi gelar panggilan datuk. Gelar itu dipakai pada awal gelar warisannya. Macam gelar warisan tergantung pada status kepenghuluannya. Jika statusnya penghulu andiko, gelar warisannya memakai nama tunggal. Jika penghulu belahan, akan dipakai gelar warisan ganda dengan tambahan kata sifat yang lazim dipakai sehari-hari. Kalau terjadi lagi pembelahan, maka gelar itu diberi sisipan *nan*.

1.4 Kesusastraan Minangkabau

a) Pantun

Buah kesusastraan Minangkabau yang terpenting adalah pantun, kaba, dan pidato. Pantun merupakan yang paling utama dari semua. Ia menjadi buah bibir, bunga kaba, dan hiasan pidato. Di mana-mana orang berpantun, baik dalam percakapan, dalam meratap dan berdendang. Pantun terdiri dari beberapa baris dalam jumlah yang genap, dari dua baris sampai dua belas baris. Setiap baris terdiri dari empat kata dengan rima akhir yang sama. Separuh jumlah baris permulaan disebut sampiran. Fungsi sampiran ialah sebagai pengantar dari isi, bunyi, dan iramanya (Hakimy, 2001). Pantun yang sempurna ialah apabila sampirannya mengandung ketiga unsur itu. Hal tersebut tampak pada kutipan cerpen "Tali Rabab" berikut ini:

Datang kau dengan rambut panjang dikepang dua berdiri paling depan dan tak urung menjadi sumber ilham bagiku melempar pantun-pantun kasmaran.

Kabau siapa panjang tanduak

Lendo padi denai dibueknya

Anak siapa panjang abuak

Gilo hati denai dibueknyo ... (Banua, 2005: 116)

b) Kaba

Jika dilihat dari gaya bahasanya, Kaba merupakan produk khas Minangkabau. Jika dilihat dari isi ceritanya, maka kaba dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu klasik dan yang baru. Kaba yang dikategorikan klasik ialah kaba yang diangkat dari hikayat. Misalnya, dari hikayat *Malin Deman*, menjadi kaba Malin Deman, atau hikayat lainnya yang menjadi kaba, seperti hikayat *Umbut Muda*, *hikayat Murai Batu*. Atau kisah sama dengan hikayat, seperti *Sabai nan Aluih*, *Gadis Ranti*, dan *Tupai Janjang*. Rupa-rupa kaba pada mulanya beredar di wilayah rantau pesisir bagian barat Minangkabau yang dikuasai raja Aceh. Jika dilihat dari peredaran kaba di rantau pesisir itu dan sumber-sumber yang mempengaruhinya, dapatlah dipahami bahwa cerita kaba klasik senantiasa mengisahkan raja-raja, pangeran-pangeran, dewa-dewi, atau kisah-kisah yang menyimpang dari struktur sosial Minangkabau sendiri. Cerita kaba memperlihatkan produk kebudayaan yang bukan asli Minangkabau pada awal pertumbuhannya (Djamaris, 2002).

Dalam cerpen "Tali Rabab" karya Raudal Tanjung Banua, Kaba sebagai pelipur lara bermula muncul di rantau pesisir itu lalu menjalar ke darek (darat) yang merupakan pusat kebudayaan Minangkabau. Ketika sampai di darek, kaba menjadi sempurna dengan lebih bercirikan Minangkabau. Hal tersebut dapat dilihat dengan kehadiran mamak dalam hampir semua kaba yang dimunculkan sebagai tokoh yang menyampaikan pesan kemuliaan sistem adat. Untuk pemuasan selera umum penduduk di darat, yang menghendaki cerita-cerita yang betul-betul didukung sistem sosialnya, tukang kaba pun mulai megambil kisah yang benar-benar terjadi.

1.5 Permainan Rakyat

Dalam cerpen “Tali Rabab” karya Raudal Tanjung Banua disebutkan *Bakaba* (berkaba), yang merupakan salah satu permainan rakyat yang termasuk paling populer. *Bakaba* suatu cara berkisah yang menimbulkan banyak pengaruh kepada berbagai bentuk permainan rakyat lainnya, seperti tari, nyanyi, dan lakon. *Berkaba*, selain berkisah biasa, sering juga diiringi nyanyian. Tak jarang pula ia disertai tari bahkan lakon. Dalam berkisah biasa, pembawanya disebut tukang kaba. Akan tetapi, jika kaba itu disampaikan dengan nyanyian, terdapat berbagai cara serta gaya sendiri dan masing-masing mempunyai nama sendiri pula. Setiap nyanyian selalu diiringi alat bunyi-bunyian sebagai pengiring. Alat bunyi-bunyian itu bisa apa saja, seperti alat gesek, alat tiup, atau alat pukul. Paling kurang alat pukul itu kotak korek api yang berisi sesuatu sehingga ketika diketok-ketokkan ke lantai mengeluarkan bunyi berderai. *Bakaba* dengan memakai kota korek api sebagai alat bunyi-bunyian pengiringnya terdapat di daerah Payakumbuh dan disebut sebagai *sijobang*. Jika dibawakan cerita kaba lain namanya badikia (berdikir). Jika menggunakan alat bunyi-bunyian sebagai pengiring, jumpah pembawanya tergantung pada alat yang digunakan. Jika memakai alat tiup, diperlukan dua orang. Yang lainnya bisa seorang atau lebih banyak sehingga mereka bisa membawakannya berganti-ganti, sebagaimana yang lazim pada permainan salung dan rabab. Lazimnya salung dan rabab mengiringi nyanyian yang berpantun dan isi pantun lazimnya pula menurut pesanan.

Pengaruh kebudayaan luar, perbedaan geografis, yaitu darek (darat) dan pasisia (pesisir) dapat menyebabkan adanya perbedaan corak dan gaya dalam *bakaba*. Di wilayah darat, didominasi permainan rakyat yang bersifat Minangkabau, yaitu dengan bentuk dan yang sederhana. Sebaliknya di wilayah pasisia (pesisir), alat musiknya pun lebih beragam dan tidak monoton dibandingkan di darat.

1.6 Sumatra Barat dan Politik Indonesia

a) Sumatra Barat Dibawah Penjajahan Jepang

Cerpen “Ketika Jenderal Pulang” karya Khairul Jasmi lebih banyak mendeskripsikan peristiwa sejarah di Sumatra Barat. Pada Februari 1942, Jepang memulai invasinya ke Sumatra dengan menerjunkan unit-unit pasukan payung di Palembang dengan maksud untuk mendahului rencana Belanda yang akan merusakkan instalasi minyak di dekat kota ini. Bala tentara Jepang segera menyebar ke arah selatan dan utara Pulau Sumatra. Tentara Jepang pertama memasuki kota Padang pada 17 Maret 1942 dan sepuluh hari kemudian komandan militer Belanda di Sumatra menyerah tanpa syarat. Sumatra langsung ditempatkan di bawah pengendalian Departemen Pemerintahan Militer (*Gunseibu*) Tentara ke-25 di Singapura, yang pada tahun pertama pendudukan itu membawahi langsung wilayah Sumatra dan Malaya. Selama tahun pertama ini, fokus utama tentara pendudukan Jepang adalah untuk memfungsikan aparatur pemerintahan di Sumatra sehingga mereka dapat memanfaatkan secara efisien sumber daya vital yang ada di pulau tersebut (Kahin, 2005).

Pada awal Oktober 1943, pemerintah Jepang mengeluarkan perintah khusus tentang pembentukan Tentara Rakyat (*Giyu gun* atau *Lasykar Rakyat*). Sebagai bagian dari kebijakan ini, maka dibentuklah *Giyu gun* di Sumatera Barat dan ini merupakan peristiwa penting yang menentukan perjalanan sejarah modern daerah ini. “Tentara rakyat sukarela” inilah yang kemudian menjadi inti kekuatan Divisi Benteng yang memimpin perjuangan militer Sumatra Barat dalam melawan agresi Belanda dan dalam pemberontakan menentang pemerintahan Soekarno pada dekade 1950-an. *Giyu gun* dan unit-unit pendukungnya memungkinkan terbentuknya jalinan relasi dan jaringan organisasi di Minangkabau, yang mampu membangun solidaritas di kalangan rakyat Minangkabau apabila menghadapi ancaman dari luar.

Ciri khas *Giyu gun* lokal itu dengan berbagai cara dibentuk oleh tokoh Sumatra Barat, Chatib Suleiman dan Gubernur Chokan Yano Kenzo. Dalam acara-acara pertemuan Kerukunan Minangkabau pada akhir tahun 1942, Chatib Suleiman mengusulkan kepada Gubernur Chokan Yano Kenzo agar membentuk tentara sukarela di Sumatra Barat. Karakter *Giyu gun* Sumatra Barat berbeda menurut letak geografisnya, yaitu mempertahankan wilayah dari kemungkinan invansi

Sekutu dari laut. Untuk itu, unit-unit Giyu Gun dibentuk di Padang dan di sepanjang kawasan pesisir. Sejak awal perekrutan, tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi panitia penerimaan Giyu Gun menekankan betul tentang karakter dan tujuan nasional dari Isykar sukarela ini.

Hingga pada akhirnya, 9 Agustus 1945, Marsekal Terauchi mengundang Soekarno dan Hatta untuk bertemu di kota Dalat, Vietnam. Di sini Marsekal Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dengan Soekarno sebagai kepala negara dan Hatta sebagai wakilnya. Dalam perjalanan kembali dari Vietnam, Soekarno dan Hatta singgah di Singapura, dan di sini mereka bertemu dengan ketiga wakil Sumatra, yaitu Teuku Muhammad Hassan (Aceh), Dr. Mohammad Amir (Minangkabau), dan Abdul Abbas (Lampung). Delapan hari kemudian, pada 17 Agustus 1945, ketiga delegasi Sumatra itu hadir dalam pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut tampak pada kutipan cerpen “Ketika Jenderal Pulang” berikut ini:

Begitu tamat dari HIS, ia ingin masuk sekolah Skakel dekat kampungnya. Seminggu di sana, ia cabut, sebab melihat dengan mata kepala sendiri gurunya ditempeleng oleh seorang haitai san, prajurit Jepang. Sejak itu, ia ingin jadi tentara dan suatu saat ia akan menampar pula tentara Jepang yang tega-teganya menampar gurunya. Kemudian ia masuk Gyu Gun yang sudah dibentuk akhir tahun 1943 di Padang. Sejak itu, ia menghilang dari kampung dan begitu pulang beberapa tahun setelah proklamasi, ia sudah menjadi tentara. Rupanya ia tidak bisa melupakan tumpah darahnya. Cintanya pada kampung sendiri dibuktikan dengan cara menyempatkan pulang setiap tahun (Sakai, 2004: 137).

b) PRRI

Pada tanggal 15 Februari 1958, diumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang yang dipimpin oleh Sjafruddin Prawiranegara. Selain menjadi Perdana Menteri, Sjafruddin ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Kabinetnya mencakup beberapa kolonel pemberontak: Kolonel M. Simbolon dan Kolonel Dahlan Djambek. Namun, Dahlan Djambek hanya memangku jabatan Menteri Dalam Negeri selama beberapa minggu saja, setelah itu ia meninggalkan Jakarta dan bergabung dengan PRRI. Banyak Dewan-dewan pemerintahan daerah dan pusat tidak setuju dengan pengumuman PRRI sehingga pada tanggal 21 dan 22 Februari, pesawat pemerintah menyerang Painan, Padang, dan Bukittinggi, menghancurkan peralatan pemberontak dan merusak alat komunikasi mereka yang utama.

Orang Minangkabau dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kebanyakan dari mereka, sementara mendukung tuntutan otonomi dan tidak ingin menentang pemerintah pusat secara militer. Sejak Oktober 1957, beratus-ratus orang Minangkabau yang tinggal di Jawa kembali ke Sumatra Barat. Perpendahan bertambah banyak sesudah Proklamasi PRRI. Sementara itu, beberapa kelompok lainnya lari ke Jakarta, di mana mereka membentuk Himpunan Putera Minang.

Serangan pemerintah ke Sumatera Barat, diberi nama “Operasi 17 Agustus” dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani dan menggunakan pasukan dari Divisi Brawijaya dan Dipenogoro dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, serta kesatuan para laut dan udara. Kemudian sekitar tahun 1949, Penguasa Perang Daerah (Peperda), pada tingkat kabupaten dan nagari, dibantu oleh organisasi pemuda, yaitu OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat). Tentara mempergunakan OPR untuk mengamankan dan mempertahankan kota atau kabupaten yang mereka “bebaskan” dari PRRI. Mereka ditugaskan memelihara keamanan dan fungsi pembangunan serta mengamati dan menahan yang dicurigai pengikut PRRI.

Namun, setelah penyerahan kemerdekaan Indonesia maka konflik antar pendukung pemerintahan otonomi dengan pemerintahan pusat akhirnya mereda, dengan dibentuknya Komando Daerah 17 Agustus yang dibentuk pada tanggal 17 April 1959, untuk menggantikan

Komando Operasi 17 Agustus yang melaksanakan invasi Jakarta ke Sumatra Barat. Peristiwa tersebut tampak pada kutipan cerpen “Ketika Jenderal Pulang”.

c) Reformasi di Sumatera Barat

Di Sumatra Barat sangat menggumkan, bagaimana cepatnya rakyat meraih kemerdekaan yang baru dan mengambil tanggung jawab untuk membuang sisa-sisa rezim yang lalu dan mendirikan orde yang lebih demokratis. Tidak ahanya partai politik tapi juga surat kabar berkembang, seperti juga kritikan mereka terhadap aspek pemerintahan. Para pembangkang dan mantan pelaku pemberontakan PRRI “yang telah mengalami kesakitan yang tertahan selama tiga puluh lima tahu yang lalu” sekarang merasa bebas mengemukakan, tidak hanya kritikan mereka terhadap penguasa tetapi juga pandangan mereka terhadap negara yang lebih sesuai dengan cita-cita mereka semula. Harapan tumbuh dengan segera setelah kejatuhan Soeharto yang serupa dengan masa yang mengikuti penyerahan kedaulatan dari Belanda tahun 1950, banyak masalah dasar yang sekarang dihadapi negara, sama seperti masa lalu. Sebagaimana di masa lalu, pemegang kekuasaan menjadi takut oleh kekuatan yang telah dilepaskan. Hal tersebut tampak pada kutipan cerpen “Ketika Jenderal Pulang”.

SIMPULAN

Lokalitas Minangkabau yang terdapat dalam cerpen “Jodoh” karya A.A Navis, “Si Padang” karya Harris Effendi Thahar, “Ketika Jenderal Pulang” karya Khairul Jasmi, dan “Tali Rabab” karya Raudal Tanjung Banua memiliki tingkat persamaan lokalitas dalam ruang lingkup Minangkabau. Lokalitas yang terdapat pada satu cerpen juga mewakili lokalitas yang terdapat pada cerpen lainnya, kecuali cerpen “Ketika Jenderal Pulang” karya Khairul Jasmi. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan lokalitas Minangkabau menjadi satu kesatuan dari keseluruhan cerpen, yaitu falsafah alam Minangkabau meletakkan manusia sebagai salah satu unsur statusnya sama dengan unsur lainnya, seperti tanah, rumah, suku, dan nagari, dasar semua ketentuan adat Minangkabau yang terhimpun dalam petatah-petitih adalah rasional atau masuk akal, Landasan berpikir orang Minangkabau tercakup dalam pepatah adat yang berbunyi sebagai berikut, *rumah basandi batu* (rumah bersendi batu), *adat basandi alue patuik* (adat bersendi jalan yang benar dan pantas), *memakai anggo jo tanggo* (memakai aturan yang wajib diturut), dan *sarato raso jo pareso* (serta budi pekerti dan kecermatan), Sistem kekerabatan matrilineal sangat dipegang teguh oleh masyarakat Minangkabau, pola perkawinan yang bersifat eksogami membuat kedua belah pihak atau salah satu pihak dari yang menikah itu tidak lebur ke dalam kaum kerabat pasangannya, menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan, golongan dan kelompok dalam masyarakat Minangkabau mempunyai pimpinan yang berada di tangan mamak, buah kesusastaan Minangkabau yang terpenting adalah pantun dan kaba, dan *Bakaba* (berkaba) merupakan salah satu permainan rakyat yang termasuk paling populer.

Lokalitas Minangkabau yang mengarah pada peristiwa sejarah terdapat pada cerpen “Ketika Jenderal Pulang” karya Khairul Jasmi, yaitu tentang kedudukan pemerintahan Jepang di Sumatera Barat hingga mengeluarkan perintah khusus tentang pembentukan Tentara Rakyat (Giyu gun atau Lasykar Rakyat), peristiwa PRRI yang membuat penderitaan rakyat Sumatra Barat kian terpuruk, ditambah dengan munculnya OPR (Organisasi Perlawanan Rakyat). Cerpen-cerpen yang telah dianalisis tersebut mengacu pada representasi lokalitas Minangkabau berupa pola kemasyarakatan, sistem kekerabatan, perkawinan, adat dan hukum, penghulu, karakteristik orang Minangkabau, kesusastaan, tradisi, dan sejarah Sumatra Barat dalam Politik Indonesia.

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan membantu peserta didik dalam menguasai Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar materi pembelajaran cerita pendek kelas XI jenjang SMA, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek dan unsur isi serta kebahasaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Banua, R. T. (2005). *Parang Tak Berulu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Budiman, K. (2005). *Lokalitas dalam “Parang Tak Berulu”*. Pikiran Rakyat.
Collins, J. T. (2005). *Bahasa Melayu, Bahasa Dunia – Sejarah Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Djamaris, E. (2002). *Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

- Faruk. (2005). *Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hakimy, I. (1994). *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hakimy, I. (2001). *1000 Petatah-Petitih, Mamang-Bidal, Pantun-Gurindam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Inda, D. N. (2015). Memang Jodoh: Pemberontakan Marah Rusli Terhadap Tradisi Minangkabau. *Kandai*, 11(2), 217–233.
- Jabrohim. (2001). “Sosiologi Sastra: Beberapa Konsep Pengantar,” dalam *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Hamindita.
- Jasril, J. (2017). Penentangan Laki-Laki Minangkabau Terhadap Budaya Minangkabau Dalam Novel Hamka. *GENTA BAHTERA: Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesastraan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.47269/gb.v3i1.1>
- Junus, U. (1986). *Sosiologi Sastera: Persoalan Teori dan Metode*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Kahin, A. (2005). *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926 – 1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Latief, Chaidir N., dkk (Ed. . (2004). *Minangkabau yang Gelisah: Mencari Strategi Sosiologi Pewarisan Adat dan Budaya Minangkabau untuk Generasi Muda*. Bandung: Lubuk Agung.
- M.S, A. (2006). *Adat Minangkabau – Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Mahayana, M. S. (2005). *Sembilan Jawaban Sastra Indonesia*. Jakarta: Bening Publishing.
- Mahayana, M. S. (2006). *Bermain dengan Cerpen – Apresiasi dan Kritik Cerpen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Navis, A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru – Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Navis, A. (1999a). *Jodoh*. Jakarta: Grasindo.
- Navis, A. (1999b). *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*. Jakarta: Grasindo.
- Piliang, J. (2017). Penentangan Laki-Laki Minangkabau Terhadap Budaya Minangkabau dalam Cerpen Harian Kompas. *Jurnal Totobuang Kemdikbud*, 5(2), 215–228.
- Ratna, N. K. (2015). *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra: Dari Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Perspektif Wacana Naratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sakai, G. tf. (ed. . (2004). *Kalau Julies Sedang Rindu, Cerita dari Sumatera Barat*. Yogyakarta: Logung Pustaka dan Akar Indonesia.
- Suwando, Bambang, D. (1978a). *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suwando, Bambang, D. (1978b). *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera Barat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Teeuw, A. (1989). *Sastra Indonesia Modern II*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Thahar, H. E. (2003). *Si Padang*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.